

BAB I

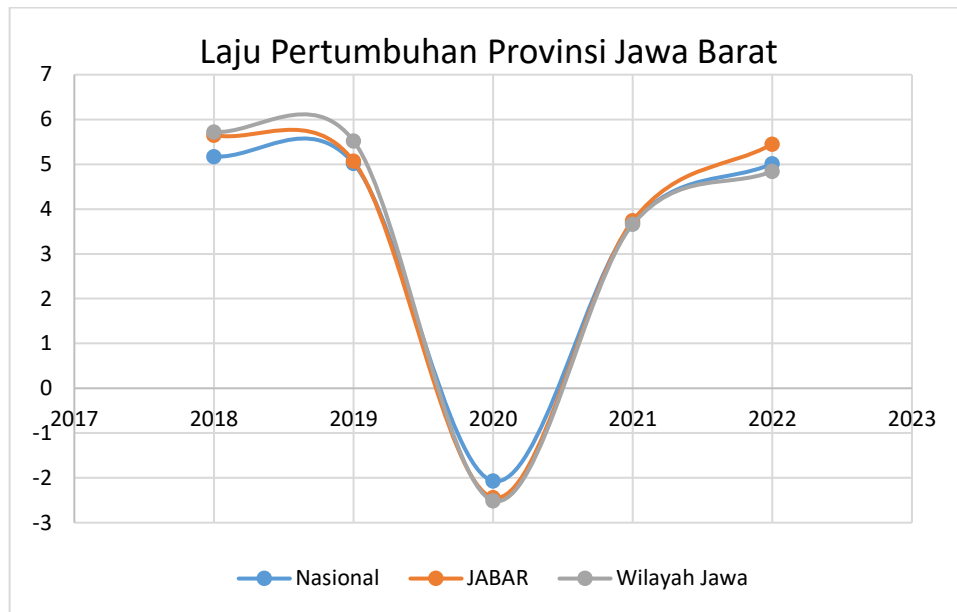
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya sistem otonomi daerah, maka pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dilimpahkan kewenangan agar dapat mengatur segala urusan dalam daerahnya sendiri dan meminimalisir adanya campur tangan pemerintah pusat, diberlakukannya otonomi daerah akan memberikan daya saing setiap daerah untuk saling berlomba dalam meningkatkan potensi daerahnya hingga sanggup mewujudkan peningkatan ekonomi seperti tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut tersirat tanggungjawab yang lebih besar yaitu kemajuan dan kemunduran daerah ada pada daerah tersebut. Hal ini berarti, daerah harus mampu untuk menentukan dan menetapkan skala prioritas yang tepat dan sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan sumber daya dan lingkungan hidup (Nuryasman, 2014).

Potensi ekonomi yang ada disetiap daerah perlu digali dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan mengembangkan potensi ekonomi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah. Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional (Tumangkeng, 2018). Sektor unggulan merupakan sektor yang paling efektif untuk berperan sebagai mesin pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu yang mengacu pada kemampuan sektor tersebut untuk mendorong dan menopang pertumbuhan seluruh sektor (Tolosang, 2020).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan perekonomian di suatu negara atau wilayah menjadi lebih baik dalam kurun waktu tertentu (Ahmad, 2021). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihitung dengan 2 (dua) pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi antar daerah baik di Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat yang beragam. Keberagaman ini dapat terjadi karena perbedaan potensi dan sumber daya alam antar Kabupaten dan Kota.



Gambar 1. 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat selama periode 2018-2022 cukup baik dan relatif stabil bahkan di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan selisih yang bervariasi. Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan perekonomian provinsi lain se-Jawa, Jawa Barat termasuk dalam kelompok yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021). Namun apabila dilihat laju pertumbuhan ekonomi per tahun, pada tahun 2018 cukup stabil, dan jika dilihat antar daerah terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang memiliki LPE lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kota Banjar (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021). Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melambat hal ini diakibatkan karena adanya penurunan kinerja sektor

industri pengolahan yang mengalami tekanan akibat situasi global dan domestik. Laju pertumbuhan ekonomi di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 menunjukkan pencapaian yang variatif, dan jika dilihat antar daerah terdapat sembilan Kabupaten/Kota yang memiliki LPE lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Banjar (DJPb Provinsi Jawa Barat, 2019). Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, terkonsuksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak triwulan I-2020 yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini sebagai dampak dari kebijakan pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik di Jawa Barat yang dibuktikan dengan trend kasus Covid-19 yang semakin melandai. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya pemulihan ekonomi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor ekonomi (BPS Provinsi Jawa Barat, 2023). Namun jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi per daerah terdapat pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023).

Berdasarkan data Indeks Williamson, indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesenjangan antar wilayah. Jika Indeks Williamson

mendekati angka 1 (satu) berarti pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata dan sebaliknya jika mendekati 0 (nol) berarti sangat merata. Laju pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori tinggi, dengan nilai Indeks Williamson diatas 0,5 meskipun LPE Provinsi Jawa Barat cukup stabil namun jika dilihat LPE per tahun menunjukkan penurunan tetapi laju penurunannya relatif lambat. Ketidakmerataan LPE Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang cukup tinggi dipicu oleh perbedaan potensi-potensi yang dimiliki di tiap daerah sehingga hasil pendapatan asli daerah kurang maksimal. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat salah satunya dengan meningkatkan potensi sumber-sumber ekonomi asli pada daerah-daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang lebih rendah. Upaya peningkatan potensi ekonomi dilakukan diantaranya dengan mengembangkan potensi aktivitas basis perekonomian daerah, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas perekonomian daerah tersebut dengan perekonomian di Wilayah lainnya (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Wahyuni, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintahan daerah dan

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (DJPb Kemenkeu Provinsi Jawa Barat, 2020). PAD Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sementara jika dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi PAD mengalami penurunan. Selama kurun waktu tiga tahun, Pajak Daerah menjadi sumber pendapatan utama dalam kerangka Pendapatan Asli Daerah (PAD) (DJPb Provinsi Jawa Barat, 2021). Kondisi rendahnya penerimaan PAD di tingkat Pemda Kabupaten dan Kota adalah masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, masih rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat dan kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wahyuni, 2020).

Selain PAD, dana perimbangan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah (Anistia & Ichsan, 2022). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana transfer umum terdiri atas, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana transfer khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Dana perimbangan di Jawa

Barat mengalami fluktuasi, dimana realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019, namun meningkat pada tahun 2021 (DJPb Provinsi Jawa Barat, 2021).

Penelitian ini menggunakan acuan dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia” (Anistia & Ichsan, 2022) penelitian ini dilakukan seluruh Indonesia sedangkan penulis melakukan penelitian Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Penulis juga akan melakukan penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tahun anggaran 2018-2022, sedangkan peneliti terdahulu meneliti Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh Provinsi di Indonesia dengan menggunakan tahun anggaran 2015-2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI” (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam

penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan antara lain:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2022.
2. Bagaimana dana perimbangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2022.
3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2022.
4. Berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Berapa besar pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2022
2. Untuk mengetahui tingkat dana perimbangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2022
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2022

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis baik bagi penulis maupun bagi instansi itu sendiri.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk perbandingan antara pengetahuan teoritis yang diterima penulis selama masa perkuliahan dengan pelaksanaan dalam praktik pada instansi yang dijadikan objek penelitian.
2. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang membahas akuntansi pemerintah khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. **Bagi Penulis**

Sebagai wadah yang tepat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi dan menganalisis jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan.

b. **Bagi Instansi**

Berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun laju pertumbuhan ekonomi pada tiap daerah yang di masa yang akan datang.

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan referensi maupun bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini terdapat di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan pada Maret 2023 sampai dengan selesai.